

SKRIPSI

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 – 2021)



**VINGKY PABESAK
1910321006**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021)



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

VINGKY PABESAK
1910321006

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 – 2021)

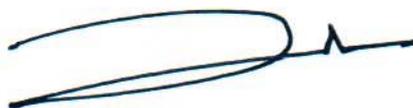
disusun dan diajukan oleh

VINGKY PABESAK
1910321006

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 17 Mei 2023

Pembimbing



Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN : 0921026601

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Yasmi S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN : 0925107801

SKRIPSI

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

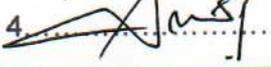
(Studi Kasus Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 – 2021)

disusun dan diajukan oleh

VINGKY PABESAK
1910321006

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **17 Mei 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA NIDN : 0921026601	Ketua	1..... 
2.	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak NIDN : 0905077106	Sekretaris	2..... 
3.	Juliana Sartika Djafar, S.E., M.Si NIDN : 0901079403	Anggota	3..... 
4.	Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M NIDN : 0901016507	Eksternal	4..... 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom
NIDN : 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN : 0925107801

PENYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Vingky Pabesak
NIM : 1910321006
Program studi : S1 Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 – 2021)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Vingky Pabesak

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi ini dengan tepat waktu. Proposal skripsi ini merupakan tugas wajib untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Dalam menyusun proposal skripsi ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa selesainya proposal skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, semangat serta bimbingan dari berbagai pihak. penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ayahanda **Almarhum Lorens Pabesak** dan Ibunda **Almarhumah Linda Galugu**, serta adik **Joy Pabesak** dan Juga Orang Tua Kedua Ibunda **Yuliana Biantong** yang telah menjadi semangat, yang telah memberikan doa dan kasih sayang, serta dukungan baik materi maupun motivasi yang luar biasa bagi penulis.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA** selaku dosen Pembimbing dan sekaligus dosen Penasehat Akademik penulis, yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi penulis untuk dapat menyelesaikan proposal skripsi penulis. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.,Si selaku Rektor Universitas Fajar Makassar
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.Ikom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

-
4. Dosen dan staf Universitas Fajar Makassar
 5. Teman-teman angkatan 2019 S1 Akuntansi kelas 1
 6. Kepada teman-teman Putri Yerusalem penulis Nensi, Mizpa Agatha Sapan, Grace Natasya dan Datu Kirani juga Jadeplant swf yang selalu siap membantu penulis

5. Teman-teman angkatan 2019 S1 Akuntansi kelas 1
6. Kepada teman-teman Putri Yerusalem penulis Nensi, Mizpa Agatha Sapan, Grace Natasya dan Datu Kirani juga Jadeplant swf yang selalu siap membantu penulis
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. apabila terdapat kesalahan dalam proposal skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Makassar, 13 Mei 2023

Penulis

ABSTRAK

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021)**

**VINGKY PABESAK
MUH. RIDWAN HASANUDDIN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Toraja Utara dengan menggunakan metode rasio keuangan dalam penelitian ini objek yang digunakan ialah laporan keuangan yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021. Analisis rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021 ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan masih kurang baik dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rasio kemandirian Kabupaten Toraja Utara masih tergolong rendah sekali, rasio efektivitas tergolong cukup efektif, rasio efisiensi tergolong cukup efisien, untuk rasio keserasian belanja daerah lebih banyak dialokasikan kepada belanja operasi, dan untuk rasio pertumbuhan tergolong rendah dan terus menurun tiap tahunnya

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Keserasian, dan Pertumbuhan

ABSTRACT

**FINANCIAL RATIO ANALYSIS TO ASSESS LOCAL GOVERNMENT
FINANCIAL PERFORMANCE
(North Toraja District Case Study For 2019-2021)**

VINGKY PABESAK
MUH. RIDWAN HASANUDDIN

This study aims to find out the financial performance of the North Toraja regional government using the financial ratio method. In this research, the object used is the financial report in the form of the North Toraja Regency Regional Revenue and Expenditure Budget for 2019-2021. The financial ratio analysis used is the independence ratio, the effectiveness ratio, the efficiency ratio, the compatibility ratio, and the growth ratio. By using data collection methods in the form of literature and documentation. The results of this study show that North Toraja Regency in 2019-2021 in terms of the ratio of independence, the ratio of effectiveness, the ratio of compatibility and the ratio of growth is still not good and has decreased from year to year. The independence ratio of North Toraja Regency is still very low, the disability ratio is quite effective, the efficiency ratio is quite efficient, for the ratio of compatibility of shopping areas more is chosen for operating expenses, and for the growth ratio it is relatively low and continues to decrease every year

Keywords: Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness, Efficiency, Harmony, and Growth

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Otonomi Daerah	10
2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	11
2.3 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
2.4 Tinjauan Empirik.....	17
2.5 Kerangka Penelitian	22
2.6 Defenisi Operasional	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Rancangan Penelitian.....	25
3.2 Tempat dan Waktu	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	25
3.3.1 Jenis Data	25
3.3.2 Sumber Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Pengukuran Variabel	26
3.6 Instrumen Penelitian	28
3.7 Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	31
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara	31

4.1.2	Sejarah Kabupaten Toraja Utara	31
4.1.3	Visi dan Misi Kabupaten Toraja Utara.....	32
4.2	Hasil Penelitian.....	34
BAB V PENUTUP		48
5.1	Kesimpulan.....	48
5.2	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....		53
LAMPIRAN.....		56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah.....	28

Tabel 3.2 Pola Hubungan Tingkat Efektivitas dan Kemampuan Daerah.....	29
Tabel 3.3 Pola Hubungan Tingkat Efisiensi dan Kemampuan Daerah.....	29
Tabel 3.4 Pola Hubungan Tingkat Belanja Operasi dan Modal dan Kemampuan Daerah.....	29
Tabel 3.5 Pola Hubungan Tingkat Pertumbuhan dan Kemampuan Daerah.....	30
Tabel 4.1 Laporan Realisasi APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021.....	31
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021.....	32
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021.....	34
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021.....	36
Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Rutin Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021.....	37
Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021.....	38
Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah ialah sebuah institusi yang menjalankan seluruh kegiatan penyusunan dan pelayanan untuk masyarakat di suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menyusun dan mengurus secara mandiri urusan dalam pemerintahannya yang berlandaskan atas asas otonomi daerah. Diberikannya otonomi daerah yang luas untuk sebuah daerah diperuntukkan dari pemerintah pusat guna mempercepat terciptanya peningkatan kompetitif dengan mengindahkan prinsip demokrasi.

Saat ini dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, untuk dapat mengembangkan independensi dan mengurangi dependensi daerah kepada pemerintah pusat. Pada peningkatan kemandirian daerah ini begitu erat hubungannya dengan kesanggupan daerah untuk menghasilkan pendapatan yang asli dari daerah tersebut, yang juga nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah tersebut. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah akan menunjukkan semakin tinggi juga keyakinan masyarakat terhadap pemerintah selaras mengenai hasil yang juga telah dicapai. Pada hakekatnya, masyarakat harus lebih serius dalam mempertimbangkan efektivitas pemerintah daerah, serta perlunya akuntabilitas dan transparansi publik atas lembaga sektor publik (Indrayani & Khairunnisa, 2019).

Otonomi daerah yang luas mengungkapkan jalan untuk pemerintah dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang mengarah kepada kepentingan publik. Sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi daerah adalah sebuah wewenang, kewajiban dan hak daerah otonom

untuk menyusun dan menangani secara mandiri urusan pemerintahannya serta keperluan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk menaikkan pelayanan kepada publik yang lebih unggul dan demokratis (Zulkarnain, 2020). Dengan terlaksananya otonomi daerah ini diharapkan seluruh Indonesia mampu mengelola segala aspek penyelenggaraan pemerintahan juga pembentukan daerah tersebut dengan mempercayakan kepada pendapatan daerahnya sendiri. Penyerahan asal keuangan daerah baik berupa pajak daerah serta retribusi wilayah maupun berupa dana perimbangan ialah konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintah kepada daerah yang diselenggarakan sesuai otonomi wilayah (Nunuy Nur, dkk, 2020:4).

Sebuah bagian mendasar dalam rangka implementasi terkait otonomi daerah ini merupakan perkara mengenai anggaran daerah juga keuangan daerah tersebut. Dalam hal ini, mampu mewujudkan sebuah otonomi daerah yang baik, jelas, luas dan mampu untuk bertanggungjawab dibutuhkan tata laksana keuangan daerah juga dapat mendominasi sebuah strategi keuangan daerah dengan efektif, efisien juga memiliki transparansi

Kemudian hal yang dilakukan untuk menilai sebuah keberhasilan organisasi publik seperti pemerintah daerah ini dalam tahun-tahun tertentu, sehingga untuk berikutnya dapat dijadikan sebagai pendorong dalam meningkatkan performa dimasa depan adalah dengan pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan ialah birometer dari pengelolaan sebuah keuangan suatu institusi yang memiliki kaitan dengan sentral pertanggungjawaban, kinerja keuangan pemerintah daerah ini merupakan takaran perolehan suatu pendapatan operasi dari aspek keuangan daerah yang

melingkupi belanja daerah dan penerimaan daerah memakai bentuk keuangan yang lalu ditentukan oleh ketentuan atau kebijakan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja merupakan proses evaluasi pertumbuhan daerah terhadap sasaran maupun haluan yang telah diputuskan sebelumnya, dengan termasuk keterangan berdasarkan efisiensi dalam penggunaan dana. Pengukuran kinerja merupakan hal yang fundamental untuk mengukur sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah suatu daerah dalam melaksanakan manajemen keuangan daerahnya. Menurut (Nanik Wahyuni, 2010) akuntabilitas pemerintah bukan saja hanya sekedar kesanggupan pemerintah dalam membuktikan bagaimana keuangan publik dibelanjakan, melainkan meliputi kesanggupan pemerintah juga menunjukkan bahwa keuangan publik terbukti dibelajakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

(Mardiasmo, 2016:121) menyatakan pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dilangsungkan guna memadati tujuan dari pemerintah daerah dalam memperbaiki prestasinya, menopang pengalokasian suatu sumber daya dan penyusunan pengambilan keputusan dan juga mampu melaksanakan pertanggungjawaban terhadap publik juga memperbaiki komunikasi sebuah institusi. Pemerintah harus bertanggungjawab dalam melaksanakan roda pemerintah, dan pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menerangkan dan menyajikan laporan kinerjanya untuk menjadi suatu patokan atau suatu gambaran jangkauan yang telah disamakan selama priode berjalan.

Tujuan atau arah dari analisis laporan keuangan ini untuk menyampaikan akses kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan guna membuat keputusan tentang kondisi keuangan suatu industri atau pemerintah. Analisis laporan keuangan merupakan suatu tindakan dalam mengintrpretasi digit-

digit didalam sebuah laporan keuangan guna menimbang kinerja keuangan yang hasil penguraian tersebut hendak dipakai sebagai asas dalam pengambilan suatu keputusan sosial, politik maupun ekonomi. Untuk menilai status dari laporan keuangan dengan memeriksa rasio keuangan, yang dipakai sebagai pedoman dalam mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah memakai rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio peretumbuhan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rigel Nurul Fathah, 2017 dengan judul “Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul” yang meneliti laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tahun anggaran 2010-2014 menggunakan 5 rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Sebagaimana suatu hasil analisis menunjukan bahwa rasio efektivitas Kabupaten Gunung Kidul tergolong Efektif. Rasio efisiensi keuangan Kabupaten Gunung Kidul belum efisien. Sedangkan rasio keserasian masih banyak menjatah belanja opeasi dibandingkan dengan belanja modalnya. Untuk rasio pertumbuhan PAD tumbuh secara baik dan juga untuk rasio kemandirian keuangan daerah sedang terhitung masih sangat rendah dan dalam kategori pola hubungan instruktif. Teratur untuk sebuah priode tertentu dalam suatu daerah. Adapun rasio yang digunakan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian membuktikan kesanggupan pemda memodali sendiri aktivitas pemerintahannya mulai dari pembangunan dan juga tentang pelayanan pada masyarakat yang sudah membayar pajak serta retribusi sebagai asal pendapatan yang sangat diperlukan daerah (Halim 2018:128). Rasio kemandirian keuangan daerah dirumuskan demikian:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas PAD

(Mahmudi, 2015:143) menyatakan bahwa rasio efektivitas menunjukkan kekuatan sebuah pemerintah daerah dalam pengarahannya dan penggunaan penerimaan PAD sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi PAD mendeskripsikan kemampuan suatu pemerintah daerah untuk mewujudkan PAD yang sudah direncanakan kemudian membandingkan dengan target yang sudah ditetapkan berdasarkan suatu potensi nyata daerah. Halim (2018:234) menyatakan rasio efisiensi keuangan daerah mendeskripsikan perbandingan terkait dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang sudah diterima. Semakin kecil hasil dari rasio efisiensi keuangan daerah maka semakin bagus kinerja pemerintah daerah tersebut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian merupakan penggambaran suatu pemerintahan daerah dalam memprioritaskan alokasi dana yang dimiliki terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan dengan maksimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan bagi belanja rutin maka presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat cenderung makin kecil. Didalam menghitung rasio keserasian ada dua perhitungan yaitu Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD dan Rasio Belanja Modal terhadap APBD. Selanjutnya rasio keserasian dapat diformulasikan demikian:

$$\text{Rasio Belanja Rutin/Operasai APBD} = \frac{\text{Belanja Rutin Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belanja operasi ialah belanja yang memiliki manfaat habis, rutin serta berulang. Pada umumnya bagian belanja operasi ini memiliki dominasi total belanja daerah, yaitu kisaran 60% hingga 90% pemerintah daerah yang memiliki taraf pendapatan wilayah yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang tinggi dibandingkan pemerintah yang memiliki taraf pendapatan yang rendah (Mahmudi 2016:164).

Rasio Belanja Modal APBD adalah perbandingan antara jumlah keseluruhan realisasi belanja modal dan juga jumlah keseluruhan belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, mampu diketahui bahwa porsi belanja daerah yang dialokasikan bagi investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan.

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Untuk rasio belanja masih belum ada standar yang tepat mengenai besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal terhadap APBD, karena dipengaruhi oleh dinamika pembangunan juga kebutuhan investasi yang diperlukan guna mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2018:189). Dari sisi lain, sebagai suatu daerah dinegara yang sedang berkembang partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk melancarkan pembangunan.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini ialah rasio yang menakar bagaimana kesanggupan pemda guna melaksanakan dan meningkatkan keberhasilan pemerintah tersebut yang telah dihasilkan dari suatu priode ke priode berikutnya. Menurut (Halim, 2018:298) rasio pertumbuhan mengukut kesanggupan suatu pemerintah daerah untuk

meningkatkan dan mendirikan keberhasilan yang sudah diraih oleh pemerintah daerah selama beberapa periode :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{X_n - X_{n-1}}{X_{n-1}} \times 100\%$$

Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Toraja Utara yang bertanggungjawab untuk pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan peningkatan pendapatan di kabupaten Toraja Utara. Diantara beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, Toraja Utara memiliki 21 kecamatan dengan 111 lembang dan 40 kelurahan mempunyai potensi PAD yang cukup besar karena luasnya kabupaten Toraja Utara dan potensi-potensi yang dimilikinya.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana kinerja keuangan Toraja Utara sendiri yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Tana Toraja untuk menilai apakah daerah kabupaten Toraja Utara mampu berdiri sendiri dan mampu menjalankan roda pemerintahannya secara independensi sesudah pemekaran dan apakah adanya covid-19 pada rentan tahun 2019-2021 juga menjadi sebuah penyebab dari menurun atau meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah Toraja Utara

Mengenai pembahasan latar belakang dan penelitian terdahulu sebab itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai kinerja keuangan daerah kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan rasio keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan kajian latar belakang, peneliti menghasilkan perumusan masalah yaitu bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2019-2021 jika diukur menggunakan 5 rasio keuangan yaitu rasio Kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan dengan rumusan masalah, yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2019-2021 jika diukur menggunakan 5 rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini didambakan bisa membagikan manfaat terhadap pihak-pihak terkait guna :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil terkait penelitian ini sangat diharapkan mampu memajukan akuntansi sektor publik terutama dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dan juga mampu memberikan wawasan tambahan mengenai rasio keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1). Bagi Universitas Fajar

Memberikan informasi dan pemahaman baru serta referensi dalam penyusunan skripsi

2). Bagi Instansi

Penelitian ini mampu untuk dijadikan masukan bagi pemerintah daerah yang menjadi subjek penelitian dalam rangka peningkatan kinerja instansi

3). Bagi Penulis

Sebagai salah satu sarana meningkatkan kemampuan dibidang penelitian yaitu mengungkapkan serta memecahkan masalah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah atau swatantra daerah merupakan suatu kewajiban, kedaulatan dan hak daerah otonom guna menata serta menangani secara independen urusan pemerintahan juga keterkaitan masyarakat dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan sawantra wilayah selain berlandaskan pada acuan hukum. Daerah otonom ialah integritas masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berhak menata pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam daerah tersebut menurut prakasa sendiri berdasarkan suatu cita-cita masyarakat dalam prosedur Negara Kesatuan Republik Indoonesia. Penyerahan suatu asal keuangan daerah baik berupa pajak daerah serta retribusi wilayah maupun berupa dana pengembangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintah kepada daerah yang diselenggarakan sesuai dengan otonomi daerah(Nunuy Nur, dkk 2020:4).

Secara spekulatif terkait otonomi daerah diharapkan mampu menghasilkan dua kegunaan nyata,yaitu :

1. Dengan memakai sumber daya dan kemampuan yang dimiliki di setiap daerah, kita dapat mendorong keikutsertaan, inovasi, dan inisiatif masyarakat bagi pembangunan sekaligus mendukung pemerataan suatu hasil pembangunan di seluruh daerah
2. Meningkatkan efisiensi distribusi sumber daya produktif melalui mendelegasikan tanggung jawab dalam mengambil ketentuan publik terhadap tingkat pemerintah yang lebih rendah yang mempunyai data terungkap.

2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan pemda ialah hak juga kewajiban daerah untuk pengelolaan dan pengendalian, pemda yang mampu dinilai menggunakan nominal uang. Termasuk didalamnya seluruh kekayaan yang terkait dengan hak dan keharusan dalam suatu daerah. Sebagaimana dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2022 terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah keuangan daerah adalah semua kewajiban dan hak daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang bisa dievaluasi menggunakan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik wilayah berkaitan dengan menggunakan kewajiban dan hak wilayah tersebut.

Kinerja pemerintah daerah merupakan pencapaian kerja, pada hakikatnya kinerja mampu dijadikan kesimpulan sebagai partisipasi yang diberikan oleh sebuah unit untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Kinerja pemerintah daerah ialah sebuah gambaran mengenai pendapatan, penerimaan dan juga perolehan pelaksanaan suatu/kebijakan dalam membuat terwujud target, tujuan, misi serta visi organisasi yang tergambarkan dalam *strategic planning* suatu organisasi dari pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa kinerja keuangan daerah merupakan alat ukur keuangan yang sudah memiliki dasar sebelumnya dengan target dapat mengetahui kesanggupan daerah dalam pengelolaan keuangannya.

Mardiasmo (2016:121) menyatakan tujuan dari pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah untuk mendapati tiga wujud yaitu:

1. Dapat membenahi kinerja pemerintah, pengukuran kinerjadiharapkan mampu mengakomodasi pemerintah berpusat pada sasaran dan tujuan dari program unit kerja, jadi diharapkn pada akhirnya akan dapat memampukan keberhasilan dalam memberi pelayanan terhadap publik

2. Dapat mendistribusikan sumber daya dalam pembentukan keputusan
3. Dapat memmanifestasikan suatu pertanggungjawaban publik juga membenahi komunikasi dalam kelembagaan.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus melingkupi pengukuran kinerja keuangannya. Menurut Mahsun (2012:196) parameter kinerja keuangan daerah yaitu :

1. Masukan, contohnya total dana yang diperlukan, total pegawai, dan total waktu yang diperlukan
2. Proses, contohnya kepatuhan terhadap hukum perundang-undangan, umumnya yang dipakai dalam membuat produksi hasil jasa
3. Keluar, contohnya total produk dan total jasa yang diwujudkan juga akruasi dalam produksi barang dan jasa
4. Hasil, contohnya tingkat kemampuan produk dalam melakukan fungsinyadengan baik juga jasa yang diwujudkan
5. Manfaat, contohnya tingkat kepuasan masyarakat dan tingakat keterlibatan masyarakat
6. *Impact*, contohnya pengemabangan kesejahteraan masyarakat dan penghasilan masyarakat.

2.3 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis laporan keuangan ialah sebuah rangkaian guna mengubah data dari laporan keuangan terhadap penjelasan dan keterangan yang bermanfaat untuk suatu pengambilan keputusan. Dalam analisis laporan keuangan ini melingkupi berbagai perhitungan-perhitungan mengenai penafsiran tentang rasio keuangan. Seजार dengan tahun anggaran yang berlaku dipemerintah Indonesia, pelaporan keuangan dilakukan tentang penyelenggaraan perwujudan perencanaananggaran dimulai dari tanggal 1 januari hingga 31 desember bagi

tahun anggaran yang berkaitan. Dalam hal ini, Laporan keuangan ialah laporan yang tersusun rapi menyangkut posisi keuangan yang dilaksanakan entitas. Adapun tujuan penyajian laporan keuangan ini untuk memberikan penjelasan dan keterangan mengenai keuangan dalam suatu entitas pelaporan yang memiliki manfaat untuk pengguna baik pembuatan keputusan dan mengevaluasi suatu keputusan sumber daya dan juga menunjukkan entitas pelaporan atas sumber daya yang telah diamanahkan kepadanya. Untuk mampu memenuhi tujuan tersebut maka laporan keuangan pemerintah daerah memberikan penjelasan menyangkut entitas pelaporan mengenai pendapatan dan belanja daerah.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pedoman teknis pengelolaan laporan keuangan daerah menyatakan pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh PPKD dengan cara melakukan peneguhan atas laporan keuangan yang telah diwujudkan oleh SKPD. Adapun isi dari laporan kinerja pemerintah yaitu :

1. Laporan Arus Kas (LRA)
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
3. Laporan Operasional (LO)
4. Neraca
5. Laporan Perubahan Ekuitas

Susanto (2015:82), menyatakan bahwa suatu syarat kesehatan keuangan pemda mampu diberikan nilai menggunakan metode menganalisis rasio keuangan berdasarkan keterangan dari laporan keuangan daerah tersebut.

Menurut peraturan pemerintah Mahsun (2012:135) menyatakan “Analisis laporan keuangan ialah alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan”. Analisis rasio keuangan APBD

dicapai dengan dapat membandingkan hasil yang telah dicapai dari periode sebelumnya kemudian dicocokkan dengan suatu periode agar dapat dijadikan pedoman dalam menilai laporan keuangan pemerintahannya. Menurut Halim (2018:190) “pemerintah daerah mengukur kinerja keuangannya dengan menggunakan beberapa rasio dalam penilaian kinerja keuangan daerah.”

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian membuktikan kesanggupan pemda memodali sendiri aktivitas pemerintahannya mulai dari pembangunan dan juga tentang pelayanan pada masyarakat yang sudah membayar iuran pajak serta retribusi sebagai asal pendapatan yang sangat diperlukan daerah (Halim 2018:128).

Rasio kemandirian keuangan daerah dirumuskan demikian:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas PAD

(Mahmudi, 2015:143) menyatakan bahwa rasio efektivitas menunjukkan kekuatan sebuah pemerintah daerah dalam pengarahannya dan penggunaan penerimaan PAD sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi PAD mendeskripsikan kemampuan suatu pemerintah daerah untuk mewujudkan PAD yang sudah direncanakan kemudian membandingkan dengan target yang sudah ditetapkan berdasarkan suatu potensi nyata daerah. Halim (2018:234) menyatakan rasio efisiensi keuangan daerah mendeskripsikan perbandingan terkait dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang

sah diterima. Semakin kecil hasil dari rasio efisiensi keuangan daerah maka semakin bagus kinerja pemerintah daerah tersebut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian ialah penggambaran suatu pemerintahan daerah dalam memprioritaskan alokasi dana yang dimiliki terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan secara maksimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan bagi belanja rutin maka presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat cenderung makin kecil. Didalam menghitung rasio keserasian ada dua perhitungan yaitu Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD dan Rasio Belanja Modal terhadap APBD. Selanjutnya rasio keserasian dapat diformulasikan demikian:

$$\text{Rasio Belanja Rutin/Operasai APBD} = \frac{\text{Belanja Rutin Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belanja operasi ialah belanja yang memiliki manfaat habis, rutin serta berulang. Pada umumnya bagian belanja operasi ini memiliki dominasi total belanja daerah, adalah kisaran 60% hingga 90% pemerintah daerah yang memiliki taraf pendapatan wilayah yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang tinggi dibandingkan pemerintah yang memiliki taraf pendapatan yang rendah (Mahmudi 2016:164).

Rasio Belanja Modal APBD adalah perbandingan antara jumlah keseluruhan realisasi belanja modal dan juga jumlah keseluruhan belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, mampu diketahui bahwa porsi belanja daerah yang dialokasikan bagi investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan.

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Untuk rasio belanja masih belum ada standar yang tepat mengenai besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal terhadap APBD, karena dinamika pembangunan memiliki pengaruh juga kebutuhan investasi yang diperlukan guna mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2018:189). Dari sisi lain, sebagai suatu daerah dinegara yang sedang berkembang partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk melancarkan pembangunan.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini ialah rasio yang menakar bagaimana kesanggupan pemda guna melaksanakan dan meningkatkan keberhasilan pemerintah tersebut yang telah dihasilkan dari suatu priode ke priode selanjutnya. Menurut (Halim, 2018:298) rasio pertumbuhan mengukut kesanggupan suatu pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mendirikan keberhasilan yang sudah diraih oleh pemerintah daerah selama beberapa periode :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{X_n - X_{n-1}}{X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio keuangan dengan menggunakan laporan keuangan dan dipakai sebagai pengukuran dalam mengevaluasi kinerja juga kesehatan keuangan pemerintah. Angka yang didapatkan dari suatu perbandingan dua item laporan keuanga yang mempunyai keterkaitan yang signfikan dan relevan dikenal dengan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan menurut Samryn (2015:363), merupakan metode perbandingan yang meningkatkan signifikasi data keuangan suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Menganalisis rasio keuangan dalam kaitannya dengan APBD yang sudah di tetapkan merupakan salah satu tata cara guna mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2.4 Tinjauan Empirik

Adapun Penelitian terdahulu yang dipakai sebagai pedoman dan contoh dalam pembuatan penelitian ini sehingga bisa memberikan gambaran bagi penulis.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun Meneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Baso R, Nurul Wahyuni, Sumarni S (2020)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba	Metode deskriptif kuantitatif	Pemerintah daerah kabupaten Bulukumba mengenai pemenuhan syarat pendanaan guna melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pengembangan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah karena berada di 0% -25%, meskipun PAD telah meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 8,75% pada tahun 2015 menjadi 10,04% pada tahun 2016 dan 16,54% pada tahun 2017 berarti bahwa peningkatan tersebut tidak signifikan terhadap peningkatan kemandirian finansial. Efektivitas dan efisiensi yang ditunjukkan pada tahun 2015 memiliki rasio efektivitas 93,83% dan rasio efisiensi 8,48% pada tahun 2016 memiliki rasio efektivitas 89,52%

				dan rasio efisiensi 8,24% pada tahun 2017 memiliki rasio efektivitas efisiensi 82,98% rasio 13,95%. Ini berarti bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan pendapatan asli daerahnya cukup efektif dan sangat efisien.
2	Salwa Qur'ani, Endang Kartini Panggiarti (2021)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Kota Magelang	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian 38,73% tergolong rendah/tidak mandiri, rasio efektivitas 110,85% tergolong efektif, rasio efisiensi 100,22% tergolong tidak efisien, rasio keserasian/aktivitas belanja tergolong tidak efisien. Rasio belanja operasional 87,16% dan rasio belanja modal 24,66% tergolong kurang harmonis, rasio pertumbuhan 10,16% tergolong rendah. Implikasi hasil penelitian ini adalah bahwa kota Magelang harus terus meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
3	Hery Susanto (2019)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja	Metode penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian	Rasio efektifitas kota mataram dikategorikan efektif karena presentase 101,85%, efisiensi kinerja keuangan

		Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram	deksriptif kuantitatif	pemerintah daerah kota mataram tahun anggaran 2013-2015 dikategorikan kurang efisien karena presentase dibawah 100 yakni 99,12%, kemandirian pengelolaan keuangan pemerintah daerah kota Mataram dikategorikan masih rendah dengan presentase 17,71% , perhitungan aktifitas pengeloaan keuangan daerah masih rendah karena lebih memprioritaskan alokasi belanja operasi dengan tingkat rata-rata 78,89% dibandingkan belanja modal dengan tingkat rata-rata 17,71% sedangkan untuk kinerja keuangan daerah berdasarkan perhitungan pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah dikategorikan kurang baik karena terjadi penurunan tahun 2014 sebesar 14,65% meningkat tahun berikutnya, yakni tahun 2014 sebesar 25,09% dan menurun cukup drastic pada tahun berikutnya 2015 sebesar 9,77%.
3.	Agus Putri Mulyaningsih, Suci Nasehati	Analisis Rasio Keuangan	Deskriptif Kuantitatif.	Hasii studi menunjukkan bahwa rasio

	Sunaningsih (2022)	Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus : BPPKAD Kabupaten Magelang tahun 2017-2020)		kemandirian sebesar 19,02% tergolong instruktif, rasio efektivitas memperoleh nilai 102,33% tergolong sangat efektif, rasio efisiensi memperoleh nilai 78,29% tergolong efisien, rasio aktivitas yang terbagi menjadi rasio belanja operasi memperoleh nilai 77,71% dan rasio belanja modal memperoleh nilai 21,23%, serta rasio pertumbuhan yang terbagi menjadi rasio PAD memperoleh nilai - 4,02% rasio pertumbuhan pendapatan memperoleh 1,89%, rasio pertumbuhan belanja operasi memperoleh nilai - 2,05%, dan rasio pertumbuhan belanja modal memperoleh - 22,57% dengan perolehan hasil tersebut pemerintah kabupaten Magelang mengoptimalkan potensi daerah guna meningkatkan pendapatan.
5	Wita Lianto (2018)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor	Kuantitatif Deskriptif	kinerja keuangan BPPKAD Kota Surakarta yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah tergolong tinggi dan tercermin dalam pola delegatif.

		Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) di Kota Surakarta		Kinerja keuangan Kota Surakarta masuk dalam kategori belum efektif dari rasio PAD. Oleh karena itu, ditetapkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah tidak efisien. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surakarta dalam belanja modal relative mampu melaksanakan kegiatan untuk kebutuhan pembangunan daerah, rasio aktivitas atau rasio kesesuaian dinilai cukup baik, seluruh rasio pertumbuhan telah menurun drastic, sehingga kota Surakarta menerima pendapatan yang lebih sedikit dari yang seharusnya.
6.	Rahmat Hidayat (2022)	Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Tahun 2017 – 2021)	Analisis Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai kinerja keuangan pemerintah kabupaten wajo dari tahun 2017 – 2021 apabila dimengerti dari rasio kemandirian sudah sangat rendah dan termasuk didalam pola instruktif. Rasio efektivitas PAD pemerintah kabupaten wajo berjalan efektif dengan rata-rata 97,68 % pada rasio efisiensi keuangan

				<p>daerah dikategorikan cukup efisien dengan rata-rata 86,81% rasio keserasian belanja daerah masih belum stabil di mana pengeluaran belanja operasi lebih besar dari pada belanja modal, pemerintah wajo masih kurang memperhatikan pembangunan daerahnya. Rasio pertumbuhan belum stabil karena setiap tahunnya mengalami kenaikan dan oenurunan yang tergolong masih sangat rendah karena rata – ratanya masih dibawah 10%.</p>
--	--	--	--	--

Sumber : Data diolah,2023

2.5 Kerangka Penelitian

Gambaran kerangka pemikiran dari penelitian ini mampu digambarkan :

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Data diolah,2023

2.6 Defenisi Operasional

Defenisi operasional ialah suatu cara guna menguraikan sebuah variabel yang akan diteliti. Defenisi operasional juga merupakan suatu format penelitian yang menyiapkan data untuk peneliti untuk mengenal bagaimana metode dalam menilai atau mengukur variabel. Dalam penelitian ini melibatkan lima rasio terkait yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian dikontaraskan dengan keuntungan pada pendapatan daerah dengan sumber lain pendapatan didaerah tersebut. Tujuan dari kemandirian yaitu untuk melihat mampu tidaknya suatu daerah menjalankan tugasnya dengan terutur dan untuk melihat seberapa besar dari tingkat ketergantungan daerah kepada sumber dana yang mampu dihasilkan oleh daerah tersebut.

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi keuangan daerah merupakan suatu perbandingan mengenai biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan pendapatan dan dengan realisasi pendapatan yang diterima daerah. Efisiensi adalah rasio yang menunjukkan beberapa biaya untuk memperoleh pendapatan relative terhadap berapa banyak uang yang benar – benar dihasilkan (Mahmudi, 2016:140).

3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah merealisasikan pendapatan aslinya yang sudah direncanakan dan kemudian dibandingkan dengan suatu sasaran yang sudah ditetapkan berlandaskan pada potensi nyata daerah. Semakin tinggi suatu rasio efektivitas maka, semakin tinggi pula kemampuan daerah

4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian ini menjelaskan bagaimana pemda memprioritaskan dananya terhadap belanja rutin serta belanja pembangunan secara ideal. Meningkatnya presentase dana yang didistribusikan bagi belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan yang dipakai bagi sarana ekonomi warga semakin kecil

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini merupakan pengukuran seberapa besar dan bagaimana kemampuan pemda dalam menaikkan keberhasilan yang telah diraih dalam suatu periode ke periode selanjutnya. Dengan demikian rasio ini bisa digunakan untuk menyampaikan evaluasi terhadap potensi wilayah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pengumpulan data dan informasi yang akan membantu penulis dalam memecahkan masalah dan kesulitan yang dialami penulis, penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan penelitian secara deskriptif kuantitatif. Arikunto (2006) menyatakan metode penelitian deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode yang memiliki guna membentuk gambar atau deskriptif tentang peristiwa atau objektif yang menggunakan angka atau nomor, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan serta hasilnya. Dimana metode ini berlandaskan pada indeks yang sudah disajikan dengan data yang ada dalam website resmi pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara. Sehingga dapat menjadi kesimpulan yang jelas dalam permasalahan yang ada.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil data Laporan Keuangan daerah menggunakan media website <http://torajautarakab.go.id> (diakses pada 4 Mei 2023) pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. Waktu penelitian ini mulai dari awal Mei hingga akhir Mei 2023.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber data sekunder, “sumber data sekunder ialah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang ketiga atau lewat dokumen” (Sugiyono, 2017).

3.3.2 Sumber Data

Adapun data diperoleh penulis berupa laporan keuangan daerah melalui website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara <http://torajautarakab.go.id>

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data digarap dengan berbagai sumber. Apabila damati dari segi metode pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan demikian :

1. Analaisis Konten

Analisis konten merupakan analisis yang dipakai dalam pengumpulan data pada media massa. Dimana dalam mencari data tersebut pada website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mencari data dan informasi berdasarkan tinjauan pustaka juga referensi termasuk buku, dokumen seminar, laporan maupun jurnal.

3.5 Pengukuran Rasio

1. Rasio kemandirian

Rasio Kemandirian keuangan daerah dapat dibuktikan dengan besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah dari sumber berbagai lain (Halim 2018:232).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan gambaran kesanggupan pemda dalam menyalurkan pendapatannya yang sudah direncanakan, sesudah itu dibandingkan menggunakan target yang sudah ditetapkan berdasarkan dari potensi nyata daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan pula kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2018:298)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi

Halim (2018:234) menyatakan rasio efisiensi artinya rasio yang mendeskripsikan suatu perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian

Rasio ini merupakan gambaran bagaimana pemda mengutamakan alokasi dananya pada belanja pembangunan dan belanja rutin. Pemerintah daerah dengan taraf pendapatan yang tinggi umumnya mempunyai porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkn dengan pemerintah daerah yangmemiliki tingkat pendapatan rendah Mahmudi (2010:156).

$$\text{Rasio Belanja Rutin/Operasi PAD} = \frac{\text{Belanja Rutin Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk rumus rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam suatu periode dengan periode berikutnya.

$$\text{Rasio Perumbuhan} = \frac{X_n - X_{n-1}}{X_{n-1}} \times 100\%$$

3.6 Instrumen Penelitian

Didalam penelitian ini memakai beberapa variabel yaitu kemandirian, efisiensi, efektivitas, keserasian dan pertumbuhan. Purwanto (2018:183) menyatakan instrument penelitian pada dasarnya adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu Kemandirian, efisiensi, efektivitas, keserasian, dan pertumbuhan. Masing – masing dari rasio tersebut menggunakan tingkat pengukuran dengan pedoman yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian

Tingkat rasio ini dapat diukur sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 seperti tabel demikian :

Tabel 3. 1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah

Kriteria	Presentase Kinerja Keuangan
Rendah Sekali	0% – 25 %
Rendah	25% – 50%
Sedang	50% - 75 %
Tinggi	75% - 100%

Sumber : Kepmendagri Nomor 960.900.327 tahun 1996

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dapat diukur berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pola Hubungan Tingkat Efektifitas dan Kemampuan Daerah

Kriteria	Presentase Kinerja Keuangan
Sangat Efektif	100% keatas
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	Kurang 60%

Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996

3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi dapat diukur menggunakan pengukuran yang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 demikian :

Tabel 3. 3 Pola Hubungan Tingkat Efisiensi dan Kemampuan Daerah

Kriteria	Presentase Kinerja Keuangan
Tidak Efisien	100% Keatas
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	Kurang 60%

Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

4. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan dinamika kegiatan pembangunan dan jumlah investasi yang diperlukan untuk menjangkau pertumbuhan yang diinginkan sangat berpengaruh. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja modal yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil (Halim 2018:236)

Tabel 3.4 Pola Hubungan Belanja Operasi dan Modal dan Kemampuan Daerah

Kriteria	Presentase
Tidak Baik	0% - 50%
Baik	50% - 100%

Sumber : Halim (2018,236)

5. Rasio Pertumbuhan

Bagi tingkat pengukuran rasio ini maka memakai pengukuran sesuai dengan tabel demikian :

Tabel 3. 5 Pola Hubungan Pertumbuhan Daerah dan Kemampuan Daerah

Kriteria	Presentase Kinerja Keuangan
Sangat Rendah	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber : Halim (2018,196)

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini menggunakan metode analisis deksriptif. Analisis deksriptif merupakan penggambaran data yang telah diperoleh sebagaimana adanya tanpa adanya maksud untuk membuat sebuah kesimpulan yang berlaku umum merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data (Sugiyono 2017:206). Sedangkan menurut Indrawan dan Yaniati (2016:51), metode deksriptif kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang mengkaji suatu permasalahan dari suatu kejadian dengan menggunakan angka – angka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

4.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dengan ibu kotanya merupakan Rantepao. Kabupaten Toraja Utara didirikan berlandaskan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2008 yang adalah pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Wilayah yang dikenal dengan budaya ini mempunyai jumlah penduduk 261.086 jiwa pada tahun 2021 berdasarkan data registrasi penduduk oleh Badan Pusat Statistik Toraja Utara. Dengan motto “Misa’ Kada di Po Tuo Pantan Kada di Pomatee” yang memiliki arti Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.

4.1.2 Sejarah Kabupaten Toraja Utara

Tinjauan dari pendirian Kabupaten Toraja Utara, didiskusikan kali pertama oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Pengurus KNPI Kecamatan Rantepao diamanahkan untuk memimpin pertemuan yang direncanakan. Undangan ditandatangani oleh ketua Antonius Sampetoding bersama sekretaris Michael Tonapa, dan pertemuan berhasil diselenggarakan pada tanggal 4 April 2001 di Gedung Pemuda Rantepao. Berdasarkan pembicaraan pertemuan ini mendiskusikan, pokok pikiran dipaparkan oleh Drs. Habel Pongsibidang mewakili DPD II KNPI Tana Toraja. Berturut–turut aspirasi dalam bentuk dukungan tertulis atas perjuangan pembentukan Kabupaten Toraja Utara yang pada saat itu

sudah ditanda tangani oleh sejumlah 556 tokoh – tokoh masyarakat, dipaparkan secara resmi ke DPRD Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 2 September 2002.

Kabupaten Tana Toraja mengambil aspirasi tersebut positif dan menerima aspirasi tersebut sesuai dengan memakai metode penerimaan aspirasi di DPRD penerima aspirasi dipercayakan pada Pemimpin DPRD kepada J.K Tondok yang berasal dari fraksi PKPI. Pada besok harinya pada tanggal 3 September 2002 oleh pelimpahan wewenang masyarakat yang sama, aspirasi secara sah disampaikan pula kepada Bupati Tana Toraja. DPRD Kabupaten Tana Toraja sesudah menerima aspirasi masyarakat tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara langsung memberikan tugas pada Panitia Musyawarah guna membuat persiapan agenda sidang Paripurna DPRD untuk pembicaraan terkait aspirasi masyarakat tersebut. Dari pembicaraan tersebut adalah pada hari itu juga tanggal 12 September 2002 DPRD mengawali Sidang Pleno memberi pernyataan sudah menerima aspirasi masyarakat mengenai pemekaran Kabupaten Tana Toraja serta. Kemudian pada tanggal 24 September 2002 DPRD Kabupaten Tana Toraja melakukan Sidang Paripurna dan menyimpulkan sebuah keputusan mengenai Pemekaran Tana Toraja dan menetapkannya melalui Surat Keputusan DPRD Nomor :11/KEP/DPRD/IX/2002.

4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Toraja Utara

Adapun visi dan misi kabupaten Toraja Utara demikian :

1. Visi

Toraja Utara, daerah wisata budaya kaya pesona dengan ragam kreativitas dan kasih yang menyejahterakan

2. Misi

Menciptakan berbagai kemudahan yang memungkinkan warganya memiliki tingkat kreativitas yang dapat menampilkan hasil-hasil yang gemilang

Pokok – pokok yang menjadi muatan misi tersebut adalah :

1. Memampudayakan para pelaku pembangunan dalam berbagai bidang melalui pendirian pusat pelatihan dan keterampilan dan memperkuat lembaga-lembaga pendidikan sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki etos tinggi dan budaya kerja dan berdaya saing tinggi
2. Memperkuat infrastruktur pemerintahan, menggalakkan implementasi *e-administration* serta memayarakatkan prinsip-prinsip dari *Good Governance*
3. Membenahi objek-objek wisata multi dimensi, membangun pusat pengembangan budaya, dan merevitalisasi nilai-nilai adat dan budaya
4. Meningkatkan produktivitas wilayah melalui pembangunan sentra-sentra produksi dan pengolahan hasil-hasil peternakan, pertanian, perkebunan rakyat, dan perikanan
5. Membangun dan membenahi berbagai macam dan rute jaringan transportasi untuk kemudahan akses internal dan akses dari dan ke Toraja Utara.
6. Menciptakan jaringan komunikasi menyeluruh dalam rangka pelayanan terbaik bagi masyarakat.

7. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga masyarakat yang didukung oleh pembangunan lingkungan hidup yang asri, sehat, nyaman dan aman; Melindungi masyarakat dari berbagai jenis penyakit dan kejahatan hingga pada tingkat terendah.
8. Menyusun berbagai aturan perundang-undangan daerah dalam berbagai sektor pembangunan dan pemerintahan.

4.2 Hasil Penelitian

Rasio keuangan digunakan untuk menilai dan menjelaskan kinerja keuangan yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. Untuk melakukan analisis pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara, terlebih dahulu dipaparkan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 4.1 Laporan Realisasi APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021

Keterangan	Tahun		
	2019	2020	2021
Pendapatan	1,118,998,403,688	1,039,254,357,675	1,012,666,347,397
PAD	51,882,966,518	55,672,229,539	46,186,064,285
Pendapatan Transfer	949,873,081,284	992,385,230,614	887,435,896,052
Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	117,242,355,884	61,196,897,467	79,044,387,059
Belanja Operasi	660,334,854,617	652,264,080,974	682,906,836,307
Belanja Modal	240,753,225,905	238,365,260,518	144,308,996,695
Belanja Tak Terduga	33,284,250	2,805,197,000	0,00
Transfer/ Bagi Hasil Ke Desa	4,025,729,750	2,963,030,619	2,616,824,750

Transfer Bantuan Keuangan	19,743,356,867	181,819,351,178	187,295,966,800
Surplus/Defisit	26,133,682,049	(38,926,562,615)	(4,462,277,155)
Pembiayaan Netto	30,866,777,010	54,310,049,801	12,812,487,186
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	58,752,374,890	15,347,487,186	8,350,210,031

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara tertinggi pada tahun 2019 senilai Rp 1,118,998,403,688. Namun bagi belanja daerah tertinggi pada tahun 2019 senilai Rp 901,121,364,772. Kemudian sisa lebih anggaran tahun berkenan (SiLPA) terbesar terjadi juga pada tahun 2019 sebesar Rp 58,752,374,890.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah ialah rasio untuk menunjukkan kemampuan daerah mengenai membuktikan kesanggupannya dalam membiaya sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya untuk masyarakat. Dengan rumus :

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan Transfer	RKKD	Kriteria
2019	51,882,966,518	949,873,081,284	5,46%	Rendah Sekali
2020	55,672,229,593	922,385,230,641	6,03%	Rendah Sekali
2021	46,186,064,285	887,435,896,052	5,20%	Rendah Sekali

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan pada tabel 4.2, bisa dilihat bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara masih tergolong rendah sekali. Pada tahun 2019 rasio kemandirian berada di titik 5,46% mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 6,03% disebabkan karena tahun 2020 adanya peningkatan PAD dan pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara menurun. Tahun 2021 rasio kemandirian mengalami penurunan dari 6,03% pada tahun 2020 jadi 5,20% disebabkan PAD yang menurun. Berdasarkan perhitungan tersebut mampu kita lihat mengenai kemampuan keuangan Kabupaten Toraja Utara masih tergolong rendah sekali dan pola hubungan yang dimiliki yaitu pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat masih sangat memiliki pengaruh yang kuat dibandingkan kemandirian pemerintah daerah. Rata – rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara berada dititik 5,56%, ini merupakan bukti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat yang ditunjukkan pendapatan transfer lebih besar dibandingkan PAD. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara masih belum mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan.

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menilai bagaimana kekuatan pemerintah daerah mengenai penggunaan dan pengarahannya pendapatan asli daerahnya sudah setara dengan yang sudah dianggarkan. Dengan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Hasil penelitian rasio efektivitas PAD kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	REPAD	Kriteria
2019	51,882,966,518	56,220,028,100	92,28%	Efektif
2020	55,472,229,593	77,433,903,735	71.63%	Kurang Efektif
2021	46,186,064,285	57,732,296,542	80,00%	Cukup Efektif

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.3 menunjukkan mengenai rasio efektivitas dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan dari efektif menjadi kurang efektif ditahun 2020 dengan 92,28% mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 71,63% disebabkan anggaran PAD yang dipatok pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara terlalu tinggi namun yang terealisasi jauh berbeda dari yang di anggarkan. Pada tahun 2021 menengalami kenaikan kembali walaupun hanya sampai ditiitk 80,00% menjadi cukup efektif disebabkan anggaran PAD menurun dari tahun sebelumnya. Toraja Utara memiliki rata-rata rasio efektivitas PAD senilai 81,30%, hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah Toraja Utara sudah merealisasikan PAD nya dengan cukup efektif. Kabupaten Toraja Utara juga dapat dikatakan sudah cukup baik mengenai perelisasian PAD yang telah direncanakan. Hal ini dipengaruhi oleh terlalu tingginya target yang ditetapkan pemerintah dan tidak tercapainya target sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara harusnya lebih mengoptimalkan penerimaan potensi pendapatan yang sudah ada dan

mengoptimalkan pendapatan penerimaan potensi PADnya. Pemerintah Toraja Utara diharapkan tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan terus mengoptimalkan potensi PAD sehingga bisa melampaui target yang sudah ada.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah merupakan gambaran bagaimana perbandingan mengenai besarnya realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Dengan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil penelitian mengenai rasio efisiensi keuangan daerah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	REKD	Kriteria
2019	901,121,364,772	1,118,998,403,688	80,52%	Cukup Efisien
2020	893,434,538,493	1,039,254,357,674	85,89%	Cukup Efisien
2021	827,215,833,002	1,012,666,347,397	81,68%	Cukup Efisien

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan tabel 4.4 perhitungan rasio efisiensi di tiga tahun berturut-turut dikatakan cukup efisien karena berada dikategori 80% - 90%. Pada tahun 2019 ke 2020 rasio efisiensi mengalami kenaikan dari 80,52% menjadi 85,89% disebabkan karena penurunan realisasi belanja dan juga penurunan realisasi pendapatan. Kemudian di tahun 2021 kembali mengalami penurunan yang baik dititik 81,68%. Kinerja keuangan

pemerintah kabupaten Toraja Utara sudah cukup efisien karena dipengaruhi oleh pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah. Adapun anggaran yang terelisasi dalam belanja daerah tahun 2019 yaitu 901,121,364,772 dari total anggaran 1,118,998,403,688 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang tersisa masih ada sebesar 217,877,038,916 yang tidak terelisasi dikarenakan anggaran pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran belanja. Kemudian pada tahun 2020 anggaran yang terealisasi pada belanja daerah yaitu 893,434,538,493 dari total anggaran yaitu sebesar 1,039,254,357,674 dapat disimpulkan masih ada 145,819,819,181 dibandingkan tahun sebelumnya selisih realisasi belanja daerah lebih tinggi. Kemudian pada tahun 2021 belanja daerah yang terealisasi adalah 827,215,833,002 dari total anggaran yaitu sebesar 1,012,666,347,397 dapat disimpulkan masih ada dana yang tidak terealisasi sebesar 185,450,514,395.

Berdasarkan tabel 4.4 rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Toraja Utara senilai 82,69% bisa dikatakan cukup efisien. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk memperoleh pendapatannya cukup baik. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Toraja Utara sudah cukup baik karena dapat menekan jumlah belanja daerah, namun diharapkan untuk kedepannya pemerintah Toraja Utara dapat menekan jumlah belanjanya dan disesuaikan dengan pendapatan, sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi.

4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dananya terhadap belanja modal dan belanja rutin secara maksimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk

belanja operasi maka sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Belanja Rutin Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Rutin Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2020

Tahun	Total Belanja Rutin Operasi	Total Belanja	RBO	Kriteria
2019	660,334,854,617	901,121,364,772	73,27%	Baik
2020	652,246,080,974	893,434,538,493	73,00%	Baik
2021	682,906,836,307	827,215,833,002	82,55%	Baik

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa rasio keserasian belanja operasi pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 ke tahun 2020 yang berada dititik 73,27% ke titik 73,00% namun meningkat cukup pesat di tahun 2021 itu namun masih dalam kategori baik karena diatas 50% hal ini disebabkan karena belanja daerah lebih banyak dialokasikan kepada belanja operasi.

Sedangkan rumus rasio keserasian belanja modal adalah demikian:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja	RBM	Kriteria
2019	240,753,225,905	901,121,364,772	26,71%	Tidak Baik
2020	238,365,260,518	893,434,538,493	26,67%	Tidak Baik
2021	144,308,996,695	827,215,833,002	17,44%	Tidak Baik

Sumber : Data diolah,2023

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa rasio keserasian pada tahun 2019 pada titik 26,71% dan mengalami penurunan 26,67% disebabkan belanja modal berkurang. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 17,44% total belanja modal sangat berkuraang dari tahun sebelumnya. Belanja modal daerah kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan dan tergolong tidak baik karena dibawah 50% hal ini dikarenakan belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal, jadi sebagian besar belanja dialokasikan kepada belanja modal. Yang berarti bahwa dana yang digunakan sebagian besar untuk membiayai belanjaoperasi. Adapun yang termasuk dalam belanja operasi adalah,Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja Hibah dan belanja bantuan social.

Berdasarkan tabel 4.5 rata – rata rasio belanja operasi sebesar 76,27% dan dikatakan baik, sedangkan rata – rata rasio belanja modal pada tabel 4.6 senilai 23,37% dan dikatakan tidak baik. Jadi dapat dinilai sebagian besar dana yang dimiliki Toraja Utara masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Besarnya alokasi belanja untuk operasi seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara lebih condong terhadap pengeluaran untuk pemenuhan aktivitas pemerintah dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Untuk itu kedepannya diharapkan pemerintah Toraja Utara memperhatikan juga pelayanan kepada masyarakat, yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur bagaimana kesanggupan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan meningkatkan keberhasilannya dari suatu priode ke priode selanjutnya. Dengan rumus:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{X_n - X_{n-1}}{X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

X_n = Total pendapatan daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi/ tahun yang akan dihitung pada tahun ke-n

$X_n - 1$ = Total pendapatan daerah/ PAD/ Belanja Modal/Belanja Operasi tahun sebelumnya

Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021

Keterangan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	1,058,775,411,390	1,118,998,403,688	1,039,254,357,675	1,012,666,347,397
Rasio		5,68%	-7.12%	-2.55%
Kriteria		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
PAD	41,975,878,751	51,882,966,518	55,672,229,539	46,186,064,285
Rasio		23,60%	7,30%	-17.03%
Kriteria		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Belanja Operasi	643,943,173,033	660,334,854,617	652,246,080,974	682,906,836,307
Rasio		2,54%	-1.22%	4,70%
Kriteria		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Belanja Modal	216,243,328,945	240,753,225,905	238,365,260,518	114,308,996,695
Rasio		11,33%	-0.99%	-52.04%
Kriteria		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 bisa dilihat bahwa pada tahun 2019 pendapatan Toraja Utara berada di 5,68% menurun ditahun 2020 berada dititik -7,12% disebabkan pendapatan menurun begitupun di tahun 2021 dititik -2,55% setiap tahun selalu mengalami penurunan pendapatan. Jika

dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan dapat dikatakan bahwa Pendapatan Kabupaten Toraja Utara mengalami pertumbuhan secara negatif.

Sedangkan untuk rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2019 berada dititik 23,60% disebabkan kenaikan PAD pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, sedangkan 2020 mengalami penurunan hingga 7,30% kembali mengalami penurunan pendapatan asli daerah yang sangat signifikan di tahun 2021 dititik -17,03%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan PAD Toraja Utara negatif dan selalu mengalami penurunan tiap tahunnya. Diharapkan pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat meningkatkan PADnya dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimilikinya

Bagi rasio belanja operasi pada tahun 2019 berada dititik 2,45% menurun di tahun 2020 sebesar -1,22% dan meningkat kembali ditahun 2021 sebesar sebesar 4,70% disebabkan realisasi belana operasi meningkat. Sedangkan rasio belanja modal pada tahun 2019 sebesar 11,33% dan menurun di tahun 2020 sebesar -0,99% dan turun sangat signifikan pada tahun 2021 sebesar -52,04% disebabkan dikarenakan anggaran belanja modal pada tahun 2021 juga menurun menyebabkan realisasinya pun ikut menurun. Jika dilihat dari rasio pertumbuhan belanja operasi dan modal cenderung fluktuatif, pemerintah daerah lebih condong terhadap belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dapat mengalokasikan dananya dengan baik agar pembangunan di daerah tersebut bisa lebih optimal.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan berturut-turut sebagai berikut

:

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya secara mandiri. Dapat dilihat ditabel. Rata – rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara berada dititik 5,56%, ini merupakan bukti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat yang ditunjukkan pendapatan transfer lebih besar dibandingkan PAD. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara masih belum mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Sedangkan untuk dapat dinilai baik pemerintah daerah harus memiliki rasio kemandirian yang berada dititik 75% keatas.

Seperti Kabupaten Gunung Kidul yang diteliti oleh Rigel Nurul Fatah tahun 2017 menunjukkan bahwa Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan daerah selama lima tahun pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, karena masih tergolong interval 0-25%. Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

2. Rasio Efektivitas PAD

Toraja Utara memiliki rata-rata rasio efektivitas PAD senilai 81,30%, hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah Toraja Utara sudah

merealisasikan PAD nya dengan cukup efektif. Kabupaten Toraja Utara juga dapat dikatakan sudah cukup baik mengenai perelisasian PAD yang telah direncanakan. Hal ini dipengaruhi oleh terlalu tingginya target yang ditetapkan pemerintah dan tidak tercapainya target sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Seperti pada Kota Mataram yang dilakukan oleh Hary Susanto pada tahun 2019 mengatakan bahwa Kendati hasil rata-rata rasio efektifitas yang diperoleh menunjukkan katagori Efektif, namun terjadinya penurunan realisasi penerimaan harus dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, khususnya pada upaya optimalisasi pemungutan pajak maupun retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.

3. Rasio Efisiensi

Rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Toraja Utara senilai 82,69% bisa dikatakan cukup efisien. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk memperoleh pendapatannya cukup baik. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Toraja Utara sudah cukup baik karena dapat menekan jumlah belanja daerah, namun diharapkan untuk kedepannya pemerintah Toraja Utara dapat menekan jumlah belanjanya dan disesuaikan dengan pendapatan, sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi.

Seperti pada Kota Mataram yang dilakukan oleh Hary Susanto pada tahun 2019 tingkat rata-rata pencapaian efisiensi sebesar 99,12%. Pencapaian ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah dalam pemungutan PAD kurang efisien yang ditandai dengan trend rasio dibawah 100%. Artinya untuk menghasilkan output yang optimal

pemerintah daerah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Penghematan anggaran serta pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan sebaiknya mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah untuk mewujudkan kinerja keuangan daerah yang sesuai.

4. Rasio Keserasian

Rata – rata rasio belanja operasi sebesar 76,27% dan dikatakan baik, sedangkan rata – rata rasio belanja modal pada tabel 4.6 senilai 23,37% dan dikatakan tidak baik. Jadi dapat dinilai sebagai besar dana yang dimiliki Toraja Utara masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Besarnya alokasi belanja untuk operasi seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara lebih condong terhadap pengeluaran untuk pemenuhan aktivitas pemerintah dan belum memperhatikan pembangunan daerah.

Seperti Kabupaten Magelang yang diteliti Agus Putri Mulyaningsih tahun 2022 bahwa rata –rata rasio belanja operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017 –2020 memperoleh nilai sebesar 77,71 %, sedangkan rasio belanja modalnya memperoleh nilai sebesar 21,23%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang lebih besar digunakan dalam upaya memenuhi belanja rutin sehingga menyebabkan kebutuhan akan belanja modal Pemerintah Kabupaten Magelang memperoleh persentase kecil.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan kemandirian keuangan daerah setiap tahun selalu mengalami penurunan pendapatan. Jika dari tahun ke tahun

selalu mengalami penurunan dapat dikatakan bahwa Pendapatan Kabupaten Toraja Utara mengalami pertumbuhan secara negatif.

Sedangkan rasio pertumbuhan PAD Toraja Utara negatif dan selalu mengalami penurunan tiap tahunnya. Diharapkan pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat meningkatkan PADnya dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Dan untuk rasio pertumbuhan Belanja Modal dan Belanja Operasi jika dilihat dari rasio pertumbuhan belanja operasi dan modal cenderung fluktuatif, pemerintah daerah lebih condong terhadap belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021 pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2019-2021 masih tergolong rendah sekali. Disebabkan karena pemerintah Toraja Utara masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat yang ditunjukkan pendapatan transfer lebih besar dibandingkan PAD. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara masih belum mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan.
2. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara ditinjau dari rasio efektivitas pemerintah daerah Toraja Utara sudah merealisasikan PAD nya dengan cukup efektif. Kabupaten Toraja Utara juga dapat dikatakan sudah cukup baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara harus lebih mengoptimalkan penerimaan potensi pendapatan yang sudah

ada dan mengoptimalkan pendapatan penerimaan potensi PAD nya.

3. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021 berdasarkan rasio efisiensi dikatakan cukup efisien. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk memperoleh pendapatannya cukup baik. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Toraja Utara sudah cukup baik karena dapat menekan jumlah belanja daerah, namun diharapkan untuk kedepannya pemerintah Toraja Utara dapat menekan jumlah belanjanya dan disesuaikan dengan pendapatan, sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi.
4. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021 berdasarkan rasio keserasian Jadi dapat dinilai sebagai besar dana yang dimiliki Toraja Utara masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Besarnya alokasi belanja untuk operasi seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara lebih condong terhadap pengeluaran untuk pemenuhan aktivitas pemerintah dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Untuk itu kedepannya diharapkan pemerintah Toraja Utara memperhatikan juga pelayanan kepada masyarakat, yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik.
5. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021 berdasarkan rasio pertumbuhan terkait pendapatan dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan

dapat dikatakan bahwa Pendapatan Kabupaten Toraja Utara mengalami pertumbuhan secara negatif. Sedangkan untuk rasio pertumbuhan PAD Toraja Utara negatif dan selalu mengalami penurunan tiap tahunnya. Diharapkan pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat meningkatkan PADnya dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Jika dilihat dari rasio pertumbuhan belanja operasi dan modal cenderung fluktuatif, pemerintah daerah lebih condong terhadap belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dapat mengalokasikan dananya dengan baik agar pembangunan di daerah tersebut bisa lebih optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara harusnya dapat berupaya memajukan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam usaha untuk mengembangkan kemandirian daerah pemerintah juga diminta untuk dapat memaksimalkan pendapatannya melalui sumber-sumber yang dimilikinya yang sah, serta penggunaan dan pemakain aset-aset daerah yang memiliki kesanggupan. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara diharapkan melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan PAD. Kabupaten Toraja Utara juga diharapkan tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat agar

kedepannya mampu tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri dan mampu mengelola keuangannya dengan benar dan baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi penelitian berikutnya sangat didambakan bisa menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2016. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Rineke Cipta : Jakarta
- Depdagri.1997. Kepmendagri No.690.900.327, 1996, *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*
- Halim Abdul dan Muhammad Syam Kusufi 2018. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Daerah, Edisi Empat*. Salemba 4 : Jakarta
- Indrawan dan Yulianti, 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Refika Aditama : Bandung
- Indrayani dan Khaerunisa, 2019. *Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Priode 2014-2016)*, (Online), (<https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/1820>, diakses 14 maret 2023)
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta
- Mahsun Mohammad, 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE : Yogyakarta
- Mardiasmo, 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta
- Nanik Wahyuni, 2010. *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*, (Online), (<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/el-muhasaba/article/view/1879>, diakses 14 maret 2023)
- Nunuy Nur, Sri Mulyadi, Adhi Alfian, 2020. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis pada Akrual Entitas Akuntansi*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Purwanto, 2018. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan Pengembangan dan Pemanfaatan*. Magelang
- Rigel Nurul Fatah, 2017. *Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*, (Online)

<http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109>, diakses 16 maret 2023)

Samryn, 2015. *Pengantar Akuntansi : Mudah Membuat jurnal dan Pendekatan Siklus Transaksi*. Rajawali Pers : Jakarta

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Alfabeta : Bandung

Susanto, 2015. *Prediksi Kemungkinan Financial Distress Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Analisis Rasio Keuangan*. FEKON 2015 : Jakarta

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*

Zuhri dan Soleh, 2016. *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur*. (Online). (<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/284>, diakses 20 Maret 2023)

Zulkarnain, 2020. *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat*, (Online), (<https://www.cakrawala.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/40>, diakses 14 maret 2023)